



Analisis Sektor Potensial Perekonomian Kota Tangerang Selatan

Jumino¹, Edi Mulyanto², Tutug Sriyatmiko³

^{1,2,3}Universitas Pamulang
dosen01755@unpam.ac.id

Kata kunci:	Abstrak
Ekonomi Regional, Metode Location Quotient	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi ekonomi yang unggul di Kota Tangerang Selatan sebagai studi Ekonomi Regional. Metode yang digunakan adalah Location Quotient, yang membandingkan porsi lapangan kerja/nilai tambah sektor di tingkat yang lebih tinggi/nasional. Kota Tangerang Selatan memiliki posisi geografis yang strategis, terletak di antara Ibukota Negara DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor. Kota Tangerang Selatan juga merupakan daerah penyangga Ibukota Negara DKI Jakarta berdasarkan Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Jabotabek. Wilayah Kota Tangerang Selatan tumbuh pesat karena menjadi tempat berbagai kegiatan dari Ibukota Negara DKI Jakarta. Di sisi lain, kota ini juga dapat menjadi daerah pengembangan wilayah Kabupaten Bogor dan memiliki sumber daya alam yang produktif. Penelitian ini fokus pada analisis sektor potensial berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 8 sektor potensial di wilayah Kota Tangerang Selatan, yaitu sektor Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Berdasarkan potensi ini, strategi peningkatan daya saing daerah meliputi tiga pendekatan. Pertama, strategi berbasis keunggulan kompetitif daerah dengan memperkuat sistem inovasi daerah (SIDa). Kedua, strategi berbasis komoditi unggulan melalui gerakan One Village One Product (OVOP). Ketiga, strategi pembangunan tidak seimbang melalui pembangunan industri berbasis pertanian (agroindustri).

Pendahuluan

Ruang mempengaruhi cara kerja sistem ekonomi. Ruang atau regional adalah sumber keuntungan (atau kerugian) ekonomi, serta penyumbang faktor produksi tinggi (atau rendah). Sisi regional atau wilayah juga menghasilkan keuntungan geografis, seperti aksesibilitas yang mudah (atau sulit) dari suatu daerah dan sumber bahan baku yang tinggi (atau rendah). Wilayah juga menjadi sumbernya keuntungan dan munculnya akumulasi proses produktif: secara detailnya, kedekatan wilayah bisa menghasilkan keuntungan ekonomi yang mengurangi biaya produksi (Capello, 2015:1) Sumber daya produktif didistribusikan secara tidak merata dalam suatu ruang atau wilayah: Sumber daya tersebut sering terkonsentrasi di tempat-tempat tertentu.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 1999).

Pemerintah melalui UU No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah” dan UU No.33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah”, mengenai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya masing – masing berdasarkan potensi dan permasalahan wilayah.

Undang-Undang tersebut memiliki makna yang sangat penting bagi daerah, karena terjadinya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan yang selama ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat. Kewenangan tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama, serta moneter dan fiskal. Kewenangan pembiayaan, yaitu daerah dapat menggali sekaligus menikmati sumber-sumber potensi ekonomi, serta sumber daya alam tanpa ada intervensi dari Pemerintah Pusat.

Kota Tangerang Selatan selama beberapa tahun terakhir ini terus mendorong berbagai sektor untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menjadi bagian dari sebuah Penyangga Perekonomian Ibu Kota yang letaknya strategis dan suatu kawasan dinamis memiliki banyak potensi, namun terus memacu tumbuhnya industri manufaktur yang memberi nilai tambah lebih besar. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat Indonesia, yang didalamnya adalah Warga atau Penduduk Kota Tangerang khususnya. Begitu pula nilai rupiahnya yang dibelanjakan untuk berbagai kegiatan, seperti membeli barang dan jasa, juga bertambah besar.

Majunya perekonomian suatu daerah diukur menggunakan pertumbuhan ekonominya atau perkembangan jumlah PDRB, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat meningkat setiap periodenya. Diperlukan pengembangan sektor sektor unggulan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun semakin tingginya rata-rata pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan menimbulkan masalah lain berupa ketidakmerataan pendapatan. Ketimpangan pendapatan antar kabupaten atau daerah disebabkan karena adanya perbedaan potensi sumber daya manusia, infrastruktur dan potensi sumber daya alamnya.

Ketimpangan yang tinggi dapat membawa dampak yang buruk terhadap kestabilan ekonomi. Pada penelitian kali ini Peneliti memfokuskan pada Kota Tangerang Selatan bagaimana dalam mewujudkan struktur ekonomi yang kuat dalam pembangunan ekonomi regional perlu adanya keseimbangan dan keserasian yang ideal antara berbagai sektor yang ada, harus terus berpacu dan meningkatkan serta memilih potensi produk unggulan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terdiri atas 9 (sembilan) sektor, yaitu (1) sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas, dan air bersih; (5) bangunan dan konstruksi; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan (9) jasa-jasa.

Sejalan dengan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah maka daerah

kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang cukup luas untuk membuat perencanaan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Adapun kewenangan tersebut mencakup beberapa hal yaitu : perencanaan tata ruang wilayah, perencanaan pembangunan wilayah dan juga pemanfaatan secara maksimal terhadap potensi-potensi yang ada di wilayah. Akan tetapi pelimpahan wewenang tersebut akan memiliki konsekuensi yang berisikan tanggung jawab lebih besar, yaitu bahwa daerah menjadi penanggung jawab utama terhadap maju dan mundurnya suatu daerah. Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020 mencapai Rp59.538 Trilyun Rupiah dengan 4 (empat) kontribusi terbesar yaitu : Transportasi dan Komunikasi 38,70%, Keuangan 30,03 % , Jasa-jasa 25,80 % dan Sektor Konstruksi 24,92%. , Dengan demikian daerah harus lebih mampu menetapkan skala prioritas yang tepat guna untuk pemanfaatan potensi daerahnya masing-masing dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup agar pertumbuhan yang serasi, selaras dan berkesinambungan.

Artikel ini akan mengkaji bagaimana metode Location Quotient dapat membantu dalam penganalisaan yang berkaitan dengan klasifikasi sektor-sektor kegiatan ekonomi dan mengulas bagaimana peran metode Location Quotient dapat diterapkan dalam mengatasi dan mengembangkan Ekonomi Regional Kota Tangerang Selatan

Metode

Metode penelitian untuk menganalisis sektor potensial perekonomian Kota Tangerang Selatan terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama adalah persiapan penelitian yang meliputi mencari literature dan referensi yang dapat dipercaya, serta data pendukung dari berbagai sumber seperti Tinjauan Pustaka dan Badan Pusat Statistik (BPS). Tahap kedua adalah analisis kuantitatif menggunakan metode Location Quotient (LQ). Metode ini membandingkan porsi lapangan kerja atau nilai tambah sektor di wilayah Tangerang Selatan dengan tingkat nasional. Jika $LQ > 1$, maka sektor tersebut dianggap sebagai basis potensial, sedangkan jika $LQ < 1$, maka sektor tersebut dianggap sebagai nonbasis.

Metode LQ memiliki beberapa kritik, seperti asumsi bahwa produktivitas atau konsumsi rata-rata antar wilayah adalah sama. Selain itu, perlu diperhatikan juga apakah produk yang dihasilkan untuk kebutuhan lokal atau diekspor. Oleh karena itu, perlu dilakukan teknik minimum requirement untuk menghindari double counting dan memperoleh ranking sektor yang relevan.

Tahap ketiga adalah penyusunan laporan hasil penelitian yang menjadi referensi dan strategi untuk meningkatkan pertumbuhan, pemerataan, dan potensi ekonomi unggulan di Tangerang Selatan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah dengan sinkronisasi kebijakan ekonomi nasional, mengingat Tangerang Selatan merupakan wilayah penyangga ekonomi Ibukota Negara Republik Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Ilmu Ekonomi Regional adalah cabang baru dalam ilmu ekonomi yang berkembang, terkait dengan analisis potensi ekonomi wilayah. Perencana wilayah perlu mampu menganalisis sektor-sektor yang perlu dikembangkan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat potensi sektor tertentu rendah. Setelah Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kebebasan lebih dalam menetapkan sektor yang diprioritaskan.

Pentingnya kemampuan Pemerintah Daerah untuk melihat sektor-sektor dengan keunggulan komparatif menjadi semakin penting. Keunggulan tersebut bisa terkait dengan kondisi alam, penguasaan teknologi mutakhir, ketrampilan khusus masyarakat, kedekatan dengan pasar, aksesibilitas yang tinggi, konsentrasi kegiatan sejenis, aglomerasi, upah buruh rendah, mentalitas masyarakat yang mendukung, dan kebijakan pemerintah.

Ilmu Ekonomi Regional membahas pertanyaan mengenai dimana dan mengapa suatu kegiatan sebaiknya dilakukan di wilayah tertentu. Dalam menentukan lokasi, ilmu ekonomi

regional memberikan arahan sampai batas wilayah yang dipilih, namun untuk menentukan tempat kegiatan secara spesifik memerlukan bantuan dari ilmu lain, seperti ilmu kesesuaian lahan.

Sektor unggulan adalah sektor yang berperan besar dalam perkembangan perekonomian wilayah. Kriteria sektor unggulan meliputi pertumbuhan ekonomi tinggi, penyerapan tenaga kerja besar, keterkaitan antar sektor, dan penciptaan nilai tambah tinggi. Komoditas unggulan adalah komoditas andalan dengan posisi strategis untuk dikembangkan di suatu wilayah. Penetapan komoditas unggulan didasarkan pada pertimbangan teknis dan sosial ekonomi. Pemerintah perlu membuat program kebijakan yang sesuai dengan keadaan daerah dan memperhatikan sektor unggulan dalam perencanaan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Metode atau cara mencapai tujuan yang ditetapkan meliputi diagram alir penelitian yang menggambarkan langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan, serta jadwal penelitian yang diusulkan. Diagram alir harus menyertakan penahapan yang jelas, indikator capaian yang ditargetkan, dan tugas masing-masing anggota pengurus sesuai tahapan penelitian. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau deskriptif. Analisis dan interpretasi hasil ini diperlukan sebelum dibahas.

PDRB Kota Tangerang Selatan Dan PDRB Provinsi Banten

Penelitian ini bersumber berdasarkan data-data dari BPS (Badan Pusat Statistik) untuk melihat secara rinci masing-masing untuk PDRB Kota Tangerang Selatan Dan PDRB Provinsi Banten sebagai dasar analisis yang mendukung penelitian seperti pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 1			
PDRB KOTA TANGERANG SELATAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN			
MENURUT LAPANGAN USAHA (Juta Rupiah)			
Klasifikasi Lapangan Usaha	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	114,89	115,72	117,78
B. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
C. Industri Pengolahan	4.572,77	4.649,36	5.037,65
D. Pengadaan Listrik dan Gas	56,34	58,74	64,88
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30,20	31,97	33,01
F. Konstruksi	7.914,40	8.847,75	9.384,80
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.561,54	9.822,62	10.535,02
H. Transportasi dan Pergudangan	1.735,21	1.919,89	2.039,46
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.699,82	1.782,65	1.939,11
J. Informasi dan Komunikasi	10.581,04	11.288,91	12.040,08
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	802,54	841,80	843,68
L. Real Estate	11.434,56	11.794,74	12.503,61
M, N. Jasa Perusahaan	1.924,70	1.904,29	2.038,17
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	611,03	579,93	622,55
P. Jasa Pendidikan	4.344,13	4.301,99	4.250,79
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.579,87	2.861,33	2.888,52
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1.568,06	1.591,42	1.682,77
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	59.531,10	62.393,11	66.021,88
Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan			

Kategori Lapangan Usaha PDRB	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	38.998,27	40.199,75	44.050,68
B. Pertambangan dan Penggalian	4.269,64	4.658,86	4.142,44
C. Industri Pengolahan	195.331,62	209.815,06	227.675,91
D. Pengadaan Listrik dan Gas	10.504,20	12.140,42	13.016,30
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	550,95	585,16	612,68
F. Konstruksi	71.551,76	82.113,95	91.202,80
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	83.240,61	85.898,99	93.547,29
H. Transportasi dan Pergudangan	40.458,22	41.693,88	71.165,36
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15.154,34	15.890,83	17.447,46
J. Informasi dan Komunikasi	25.200,74	26.574,75	28.218,24
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	20.300,42	22.323,34	25.307,29
L. Real Estate	54.258,20	56.397,21	60.289,40
M,N. Jasa Perusahaan	7.325,21	7.329,42	7.914,75
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	14.210,48	14.457,87	15.227,22
P. Jasa Pendidikan	24.495,93	24.346,20	24.581,06
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.183,12	10.298,33	10.687,98
R,S,T,U. Jasa lainnya	10.861,69	11.163,47	12.163,45
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	625.895,40	665.887,49	747.250,31
<i>Sumber : BPS Provinsi Banten</i>			

Analisis LQ PDRB Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan dari data-data yang telah diperoleh masing-masing untuk PDRB Kota Tangerang dan PDRB Provinsi Banten (seperti yang disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2) diatas, peneliti telah melakukan analisis yang diperlukan dalam penelitian ini dengan hasil seperti yang disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut :

Kategori Lapangan Usaha PDRB	2020	2021	2022	Rata-rata	(+/-)	Basis/Non Basis
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,03	0,03	0,03	0,03	-	Non Basis
B. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	Non Basis
C. Industri Pengolahan	0,25	0,24	0,25	0,24	-	Non Basis
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,05	0,06	0,05	-	Non Basis
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,58	0,58	0,61	0,59	-	Non Basis
F. Konstruksi	1,16	1,15	1,16	1,16	+	Basis
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,21	1,22	1,27	1,23	+	Basis
H. Transportasi dan Pergudangan	0,45	0,49	0,32	0,42	-	Non Basis
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,18	1,20	1,26	1,21	+	Basis
J. Informasi dan Komunikasi	4,41	4,53	4,83	4,59	+	Basis
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,42	0,40	0,38	0,40	-	Non Basis
L. Real Estate	2,22	2,23	2,35	2,27	+	Basis
M,N. Jasa Perusahaan	2,76	2,77	2,91	2,82	+	Basis
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,45	0,43	0,46	0,45	-	Non Basis
P. Jasa Pendidikan	1,86	1,89	1,96	1,90	+	Basis
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,95	2,97	3,06	2,99	+	Basis
R,S,T,U. Jasa lainnya	1,52	1,52	1,57	1,54	+	Basis
<i>Sumber : Data diolah peneliti</i>						

Dari tabel tersebut di atas, diketahui bahwa yang menjadi sektor unggulan atau sektor basis maupun non basis di Kota Tangerang Selatan. Sektor basis dan non basis dapat dihitung melalui rumus dan juga analisis LQ (Location Quotations). Model analisis ini dihitung dengan membandingkan seberapa besarnya peranan salah satu sektor pada suatu daerah (kabupaten/kota) terhadap besarnya peran sektor tersebut pada tingkat provinsi. Analisis ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi berapa potensi internal (sektor basis) yang dimiliki oleh Kota Tangerang Selatan dan sektor non basis. Apabila indeks $LQ > 1$, dapat dikatakan bahwa sektor tersebut menjadi sektor basis. Dan $LQ = 1$, sektor tersebut dapat dikatakan hanya mampu untuk memenuhi permintaannya di wilayahnya sendiri, sedangkan apabila $LQ < 1$, sektor tersebut dikatakan sebagai sektor non basis. Berdasarkan dari perhitungan LQ diatas, diketahui hasil rata-rata nilai LQ pada sektor basis dan non basis di wilayah Kota Tangerang Selatan tahun 2020-2022. Hasil analisis LQ ke 8 (delapan) sektor dibawah ini memiliki hasil $LQ > 1$.

8 (delapan) sektor potensial (basis) di wilayah Kota Tangerang Selatan, yaitu terdiri dari sektor :

- F. Konstruksi
- G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- J. Informasi dan Komunikasi
- L. Real Estate
- M,N. Jasa Perusahaan
- P. Jasa Pendidikan
- Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Sedangkan pada sektor yang memiliki hasil $LQ < 1$, merupakan sektor non basis yaitu sektor :

- A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- B. Pertambangan dan Penggalian
- C. Industri Pengolahan
- D. Pengadaan Listrik dan Gas
- E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
- H. Transportasi dan Pergudangan
- K. Jasa Keuangan dan Asuransi
- O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Kota Tangerang Selatan memiliki sektor-sektor potensial (basis) yang dominan dan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi wilayah. Sektor-sektor tersebut meliputi konstruksi, perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, real estate, jasa perusahaan, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Potensi sektor-sektor ini perlu dipertahankan dan dikembangkan agar dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat regional maupun nasional.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan disarankan untuk memberikan perhatian dan dukungan pada sektor-sektor non-basis yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Sektor-sektor tersebut meliputi pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; transportasi dan pergudangan; jasa keuangan dan asuransi; serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan daerah.

Daftar Pustaka

- Hidayat, A. R. T., & Asmara, A. Y. (2017). Creative Industri in Supporting Economy Growth in Indonesia, Perspective of Regional Innovation System. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 70. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten menurut Lapangan Usaha 2015-2019. Banten.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Produk Domestik Regional Bruto Kota Tangerang Selatan menurut Lapangan Usaha 2015-2020. Kota Tangerang Selatan.
- Muljarijadi, B. (2011). Pembangunan Ekonomi Wilayah Pendekatan Analisis Tabel Input Output. Bandung: Penerbit Unpad Press.
- Dobrescu, E. M., & Dobre, E. M. (2014). Theories regarding the role of the growth poles in the economic integration. *Procedia Economics and Finance*, 8, 262-267.
- Junaidi, A. (2012). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(1).
- Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. (2015). Ekonomi Pembangunan. FIB Universitas Sam Ratulangi Manado.